

**POINT PENTING:**

- Kabupaten Indragiri Hulu adalah daerah dengan ruang fiskal yang tinggi,
- DBH Migas menjadi penopang pembangunan daerah Indragiri Hulu, berkontribusi 35,4 % terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya Desa penghasil menjadi kantong kemiskinan dan desa dengan kategori tertinggal menjadi paradoks.
- Perlu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan DBH Migas khusus bagi desa penghasil dan sekitar serta kebijakan penggunaan DBH untuk pembiayaan pembangunan kedepan.

# Optimalisasi Pemanfaatan DBH Migas Untuk Pembangunan Desa Penghasil dan Sekitar Tambang

## Pendahuluan

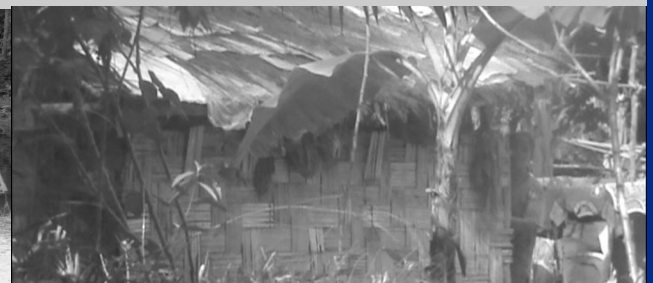
Desentralisasi memberikan keistimewaan bagi daerah, berupa keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya yang diatur dalam UU 32 tahun 2004. Berupa penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang dan lain sebagainya. Selain kewenangan tersebut, desentralisasi juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan fiskal sebagaimana diatur dalam UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah termasuk didalamnya pemberian dana bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.

Bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti daerah – daerah penghasil Migas dan pertambangan umum lainnya, akan sangat berpeluang untuk menginovasi kebijakan – kebijakan sesuai dengan prioritas masalah yang ada. Dengan deskresi fiskal (keleluasaan keuangan) yang dimiliki akan sangat mendorong untuk membiayai pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih memperbaiki taraf hidupnya.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, sistem desentralisasi administrasi (kewenangan urusan) dan desentralisasi fiskal, bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti daerah

penghasil minyak dan gas bumi yang berpotensi memiliki kemampuan fiskal yang tinggi, justru menghadapi “kutukan” sumber daya (*resource curse*). Kesenjangan menjadi bagian potret “kutukan”, baik antara wilayah/ desa penghasil dan non penghasil. Bahkan daerah yang menjadi wilayah inti penghasil sumber daya alam justru menjadi kantong-kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal. Penerimaan yang besar namun miss-alokasi atau salah kelola justru menimbulkan ketergantungan dan keterjebakan pembangunan ekonomi jangka pendek yang tidak bertahan lama dan dapat menciptakan jurang kemiskinan yang akut.

Fenomena yang mendekati dengan “kutukan sumber daya alam” tersebut mulai tampak di Kabupaten Indragiri Hulu, satu dari delapan kabupaten penghasil minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara di Provinsi Riau. Meskipun tidak sepenuhnya adalah fenomena kutukan sumber daya alam, namun fenomena itu telah menggambarkan tidak optimalnya pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Kabupaten dengan jumlah penduduk 401.201 jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 29.600 jiwa atau 7,50 persen dari total penduduk ditahun 2013. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 justru lebih tinggi dari tahun 2012.

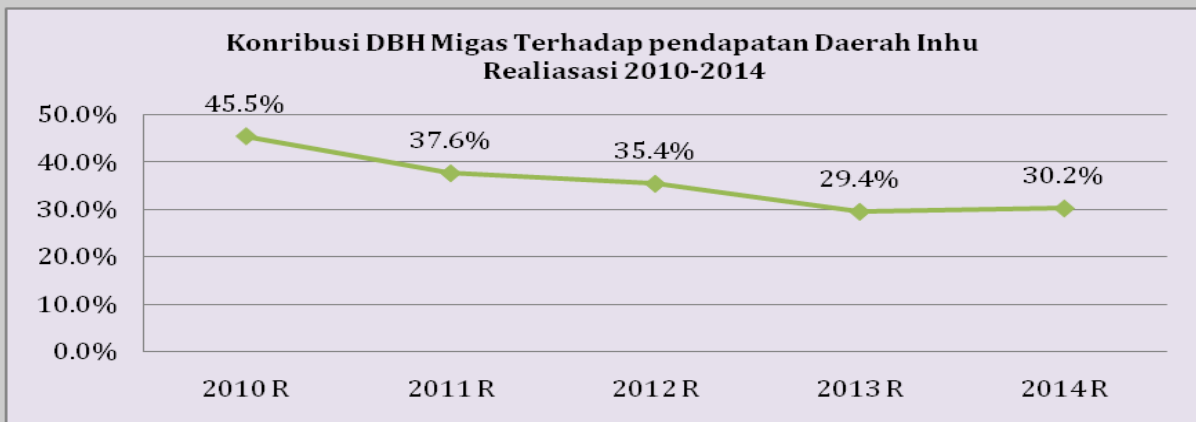


Desentralisasi kebijakan, pemerintah daerah berpeluang untuk memunculkan inovasi kebijakan yang lebih kreatif, menguntungkan dan efektif terhadap peningkatan kesejahteraan. Selagi tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang berada di atasnya. Lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan semangat pembangunan daerah berasal dari desa. Karena desa lah sebagai basis kekuatan social-ekonomi dan politik masyarakat (grasroot). Khususnya daerah / desa penghasil dan sekitar tambangan yang sangat berpotensi menghadapi masalah ekonomi baru paska tambang habis.

Policy brief ini ditulis dengan maksud untuk memberikan tawaran kebijakan kepada pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Kebijakan pemanfaatan DBH – SDA, khususnya Migas yang masih mendominasi kekuatan keuangan daerah saat ini perlu disusun strategi kebijakan yang lebih efektif, terkelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya masyarakat sekitar tambang.

## DBH Migas Penopang Keuangan Daerah

Rerata tahun 2010 – 2014, penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumberdaya alam (SDA) berkontribusi sebesar 41,2 persen dari total pendapatan yang diterima. Dari total DBH-SDA tersebut, sekitar 95 persen berasal dari DBH Migas. Artinya lebih dari sepertiga penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hulu bersumber dari DBH Migas. Dimana realisasi penerimaan daerah dari tahun 2010 -2014 sebesar Rp. 6,1 triliun dan penerimaan yang berasal dari DBH Migas sebesar Rp. 2,1 Triliun, atau 35,4 persen



Sumber : FITRA Riau 2015 (diolah dari LKPD Inhu 2010-2014)

Memang tidak seluruhnya DBH Migas yang diterima itu, dihasilkan dari perut bumi kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian besar DBH Migas yang diperoleh tersebut berasal dari perimbangan DBH yang berasal dari Kabupaten dalam Provinsi Riau. Sebagian lainnya berasal dari DBH Migas yang dihasilkan dari Indragiri Hulu. Hal itu sesuai dengan UU 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan yang mengamanatkan bahwa dari 15,5 persen yang dibagikan kepada daerah penghasil 6 persen dibagi rata kepada kabupaten Kota dalam provinsi bersangkutan sebagai bentuk pemerataan antar daerah .

Sedangkan berdasarkan laporan EITI terdapat potensi sumber daya alam Migas yang dikelola dua perusahaan (PT. Medco dan Pertamina EP – Ubep Lirik) tahun 2010 – 2011 masing sebesar Rp, 72,9 Milyar tahun 2010 dan Rp. 144,2 Milyar tahun 2011. Dari total penerimaan SDA Minyak tersebut Kabu-

paten Indragiri Hulu sebagai penghasil mendapatkan Rp. 8,9 Milyar di tahun 2011.

Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, daerah yang saat ini menjadi penghasil Minyak dan gas bumi akan dihadapkan kehilangan sumber pendapatan yang saat ini menjadi penopang pembangunan daerah. Potensi sumber daya tersebut akan pada waktunya akan mengalami penyusutan dan bahkan habis. Fenomena habisnya cadangan Migas di perut bumi daerah penghasil juga sudah mulai ditunjukkannya dengan semakin menurunnya produksi Migas setiap tahunnya. Hal itu, akan berimplikasi pada semakin kecilnya pendapatan daerah yang diterima pada waktunya, jika pemerintah sejauh ini tidak memulai untuk menggali potensi sumber daya yang bisa menjadi penopang pembangunan kedepan.

### Realisasi Pendapatan Daerah Indragiri Hulu Dari DBH SDA 2010-2014 (Rp. Juta)

| Jenis DBH SDA              | 2010 R (Rp) | 2011 R (Rp) | 2012 R (Rp) | 2013 R (Rp) | 2014 R (Rp) | % Rata-Rata |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DBH Migas                  | 390,607     | 425,025     | 468,406     | 412,116     | 493,772     | 94.7%       |
| PSDH dan DR                | 7,746,      | 15,450      | 9,683       | 2,415       | 7,314       | 1.8%        |
| Pertambangan dan Lend rent | 30,194      | 14,854,     | 12,071      | 3,529       | 19,180      | 3.5%        |
| Perikanan                  | 133         | 261         | 343         | 347         | 382         | 0.1%        |

Sumber : FITRA Riau 2015 (diolah dari LKPD Inhu 2010-2014)

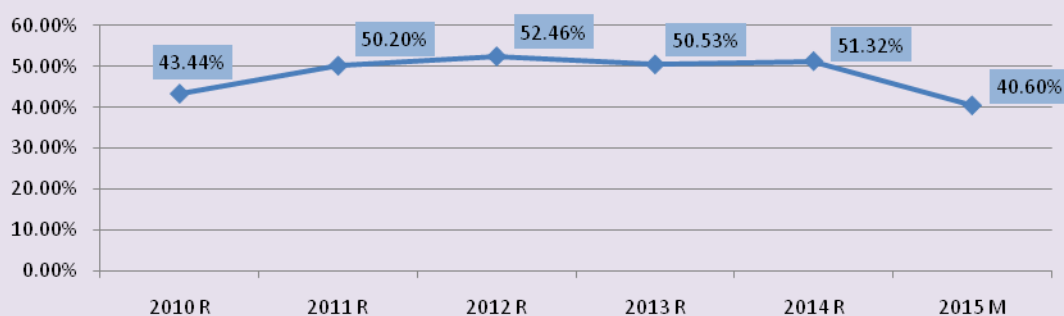
Fenomena lainnya juga diperlihatkan bahwa tidak ada kepastian sumber penerimaan yang berasal dari DBH Migas bagi daerah penghasil Migas. Fak tahun 2015 ketika harga minyak dunianya turun, maka berimplikasi besar terhadap penerimaan daerah yang diterima kabupaten penghasil, bahkan tahun 2015 daerah harus menghadapi penurunan pendapatan DBH Migas dari yang rencanakan hingga 50 persen lebih. Oleh karena itu, DBH yang saat ini masih diterma, mendorong daerah untuk lebih inovatif mengeluarkan kebijakan penggunaan DBH yang dapat memunculkan sektor produktif dan berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

## Ruang Fiskal & Kinerja Keuangan Daerah

### DBH Migas Rentan Tidak Terdistribusi Maksimal

Pendapatan daerah penghasil sumber daya alam berada jauh lebih tinggi di atas rerata kabupaten nasional, termasuk kondisi ruang fiskal daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah penghasil memiliki kapasitas keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan daerah lain. Dengan pendapatan sumber daya alam dan ruang fiskal yang tinggi seharusnya pemerintah daerah dapat dengan mudah menginovasi kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi demikian terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, besarnya pendapatan yang diperoleh dari DBH Sumber daya alam dan dibantu dengan besarnya dana alokasu umum yang diterima setiap tahunnya, daerah ini termasuk memiliki ruang fiskal yang tergolong tinggi.

Ruang Fiskal Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 - 2015\*

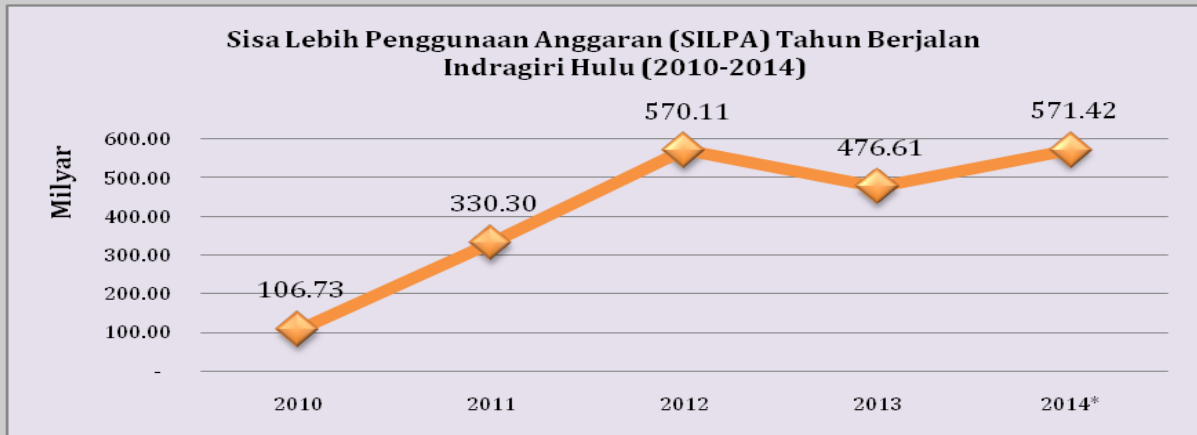


**Proporsi ruang fiskal di Kabupaten Indragiri Hulu tergolong cukup tinggi, yakni 48 persen rerata 2010-2015, pendapatan daerah masih bebas/fleksibel digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Bahkan empat tahun terakhir ruang fiskal kabupaten ini mencapai di atas 50 persen dari total pendapatan daerah yang diterima. Besarnya ruang fiskal yang**

dimiliki salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan DBH Sumberdaya Alam dan Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU). Ruang fiskal kabupaten Indragiri Hulu yang tinggi sesungguhnya memberi peluang bagi daerah untuk memproduksi terbosan – terobosan kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta menunjang pemerataan pembangunan antar wilayah.

Akan tetapi tingginya ruang fiskal yang dimiliki kabupaten Indragiri Hulu, dihadapkan dengan persoalan kinerja pembangunan yang relative rendah. Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun terakhir APBD selalu direncanakan *defisit* atau belanja daerah lebih besar dari proyeksi pendapatan yang akan diterima. Namun, dalam realisasi menunjukkan APBD selalu surplus dan menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan yang cukup tinggi.

Surplus yang terjadi akibat dari realisasi pendapatan yang diterima melebihi target dan pelaksanaan belanja daerah yang tidak terserap menyebabkan surplus anggaran yang besar. Ditambah lagi dengan SILPA tahun sebelumnya menjadikan SILPA tahun berjalan cukup tinggi. Meskipun telah dikurangi pengeluaran pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD.



Sumber : FITRA Riau 2015 (diolah dari LKPD Inhu 2010-2014)

Tahun 2014 diperkirakan SILPA tahun berjalan mencapai RP. 571,4 Milyar, atau 29,5 % dari total belanja daerah yang direncanakan pada APBD setelah Perubahan. SILPA tahun itu lebih besar dari SILPA tahun berjalan 2013 Rp. 476,6 Milyar. Namun secara umum SILPA tahun berjalan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2010 SILPA Rp. 106 Milyar menjadi Rp. 571,4 Milyar. Tingginya sisa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik masih kurang bagus.

Besarnya SILPA tahun berjalan, justru lebih besar dari Pendapatan Daerah yang diterima dari DBH Migas pada tahun 2012-2014. Hal itu menunjukkan pula kecenderungan pendistribusian DBH Migas tidak digunakan secara maksimal. Meskipun SILPA diartikan sebagai realisasi

pendapatan yang melebihi dari target yang ditentukan, namun untuk Kabupaten Indragiri Hulu, menunjukkan SILPA dari tidak terserapnya belanja daerah jauh lebih tinggi dari SILPA yang berasal dari realisasi pendapatan yang melebihi target yang ditentukan.

Ruang Fiskal yang tinggi jika dilaksanakan dengan maskimal akan sangat mendorong pemerintah untuk meningkat pembangunan dan pemerataan pembangunan. Namun, ditengah daerah kebutuhan daerah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan justru ditemukan SILPA yang sangat besar menumpuk dikas daerah. Oleh karena itu, pelimpahan anggaran dari kabupaten ke desa sebagai bentuk partisipasi desa melaksanakan pembangunan serta menetapkan pagu indikatif wilayah sangat diperlukan agar penyerapan anggaran khususnya hasil DBH Migas dapat terserap dengan



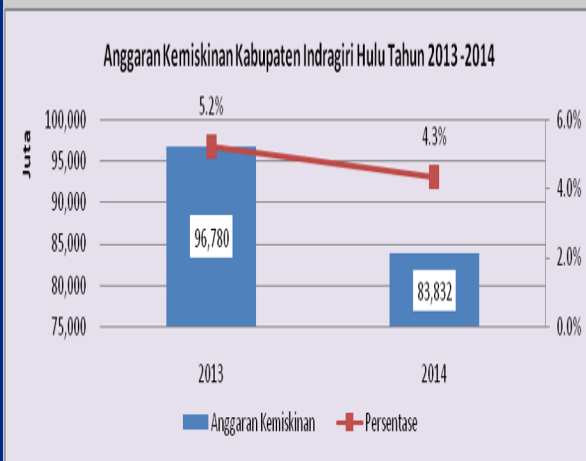
## Penghasil Migas dan Kemiskinan

Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 14 kecamatan dengan 178 Desa dan 16 kelurahan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2013 Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 401.201 jiwa, dengan angka kemiskinan tahun 2014 7,5 persen atau sebanyak 29.600 jiwa penduduk dikabupaten Indragiri Hulu dikategorikan penduduk Miskin. Kemiskinan di kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan. Tahun 2010 angka kemiskinan di kabupate Indragiri Hulu sebesar 8,90 persen menjadi 7,17 persen di tahun 2012. Angka kemiskinan justru meningkat ditahun 2013, angka kemiskinan menjadi 7,50 persen atau penduduk miskin bertambah sebanyak 1600 jiwa.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin di kabupaten Indragiri Hulu tentu menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Meskipun upaya penanggulangan kemiskinan terus ditekankan dalam perencanaan pembangunan, namun angka kemiskinan dan jumlah

penduduk miskin terus meningkat. Oleh karena itu, evaluasi atas program – program kemiskinan yang selama ini dilakukan harus dilakukan. Asumsinya dasar bahwa peningkatan jumlah kemiskinan terjadi disebabkan tidak tepatnya program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Selain itu, anggaran kemiskinan yang dialokasikan dalam APBD dan cenderung meingkat, akan tetapi jumlah penduduk miskin terus bertambah. Tahun 2013 pemerintah kabupaten Indragiri Hulu Mengalokasikan Rp. 96,7 Milyar atau setara dengan 5,2 persen dari total belanja daerah pada tahun itu yakni sebesar Rp. 1,8 Triliun. Bahkan anggaran kemiskinan tahun 2014 jauh menurun dibandingkan tahun 2013 meskipun rencana belanja daerah meningkat. Dimana tahun 2014 pemeirintah Indragiri Hulu menganggarkan Rp. 83,3 Milyar atau 4,3 persen dari total belanja daerah sebesar Rp. 1,9 triliun lebih.

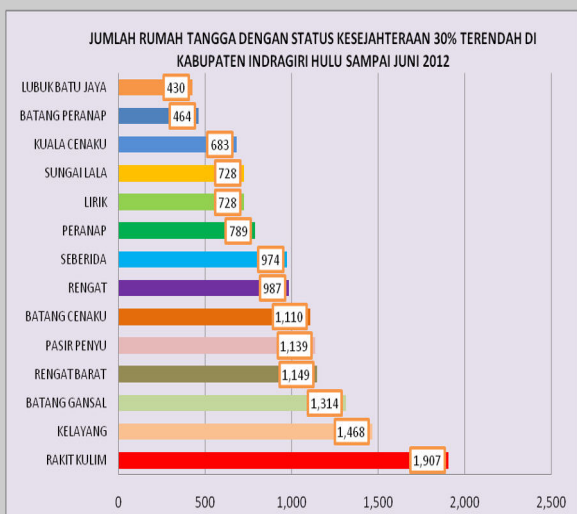


Sumber : FITRA Riau 2015 (diolah dari APBD Inhu 2013-2014)



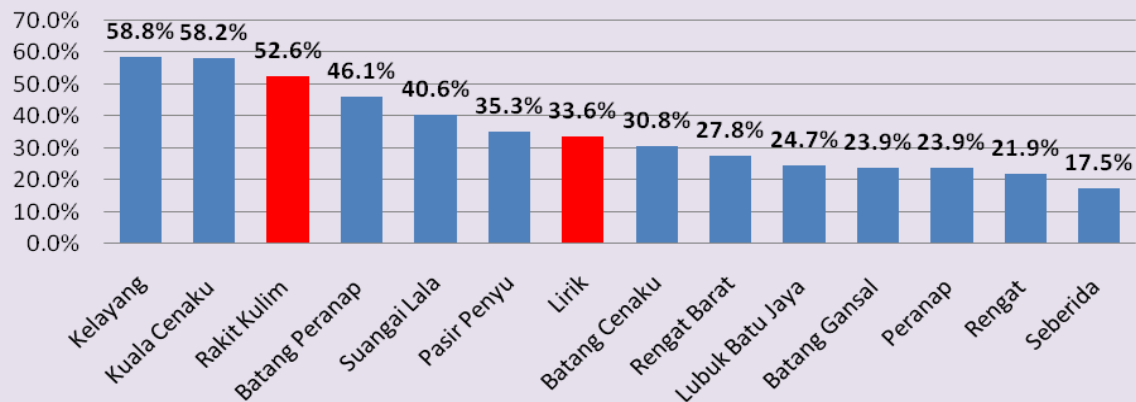
Sumber : BPS Indragiri Hulu 2015

**Asumsi selama ini, bahwa penemuan ladang minyak membawa harapan kemakmuran bagi masyarakat sekitarnya. Kondisi wilayah penghasil tambang Migas di Kabupaten Indragiri Hulu justru menjadi daerah dengan rumah tangga miskin terbesar.** Berdasarkan data TNP2K yang dirilis pad atahun 2013, bahwa berdasarkan klasifikasi kecamatan, di Indragiri Hulu, Kecamatan yang memiliki rumah tangga dengan status kesejahteraan 30% terendah adalah kabupaten Rakit Kulim. Yakni, sebanyak 1,907 Rumah tangga / KK terdidrivasi sebagai rumah tangga miskin. Pada rakit kulim adalah kecamatan penghasil Migas yang sampai saat ini masih beroperasi. Di kecamatan ini 52 persen atau lebih dari setengah jumlah rumah tangga di kecamatan tersebut merupakan rumah tangga Miskin.



Sumber: TNP2K Tahun 2013

Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kecamatan DI Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2014

Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Lirik merupakan lokasi ladang minyak dan gas bumi di kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Rakit Kulim sumur minyak terkonsentrasi di Desa talang Sungai Limau dan Talang Sungai Parit sebagai akses utama kegiatan ekplorasi. Sedangkan untuk kecamatan lirik hampir semua desa di kecamatan tersebut adalah lokasi sumur minyak yang dikerjakan saat oleh oleh PT. Pertamina E&P UBEP Lirik. Fakta menunjukkan persentase rumah tangga miskin di dua kecamatan penghasil pertambangan tersebut menunjukkan angka yang relative tinggi, meskipun tidak dalam peringkat tertinggi. 52 persen jumlah rumah tangga di kecamatan rakit kulim kondisi miskin, begitu juga di kecamatan lirik 33 persen dari jumlah rumah tangga tahun 2012 berada dalam garis kemiskinan.

Sebagai daerah penghasil migas serta desa – desa nya berada disekitarnya sangat berpotensi menjadi desa terdampak atas industry tersebut, sangat tidak layak memiliki tingkat kemiskinan penduduknya yang tinggi. Wilayah atau desa tersebut seyognya mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah khususnya disektor – sektor yang mendorong masyarakatnya keluar dari kemiskinan.

Desa Talang Sungai Limau adalah satu dari beberapa dasa yang menjadi penghasil Migas. Desa tersebut adalah wilayah operasi PT. Medco yang merupakan areal blok yang disebut blok binio. Desa dengan jumlah penduduk mencapai 1179 jiwa dengan 290 kepala keluarga yang hidup di desa itu. Tepat berada ditengah desa, terdapat penampungan minyak milik PT. Medco yang saat ini berpindah ke Pertamina. Puluhan *lukin* tersebar di desa itu, baik yang masih beroperasi (aktif) maupun yang telah lama tidak beroperasi. Terdapat 14 sumur yang masih beroperasi dengan kapasitas 100 barel / day.

Ironisnya sebagai desa penghasil dan sangat dekat dengan alat produksi Migas beroperasi justru penduduk miskin menumpuk di desa tersebut. Kondisi infrastruktur yang masih jauh tertinggal dengan desa – desa lain (non penghasil Migas), juga tingkat pendidikan masyarakat yang relative rendah. Bahkan di Desa tersebut tahun 2013 berdasarkan data BPS menunjukkan paling tinggi anak usia sekolah putus sekolah. Pemukiman penduduk dengan kondisi sangat tidak layak masih banyak tersebar di Desa itu, meskipun di halaman rumahnya membujur pipa minyak milik perusahaan. Desa itu hingga saat ini belum memiliki akses penanarangan yang memadai, meskipun sangat dekat dengan listrik bertengangan tinggi milik perusahaan.

Keluhan desa kaya dengan sumber daya alam juga datang dari kecamatan Lirik. Masyarakat menganggap kehadiran dan keberadaan perusahaan Migas tidak berkontribusi besar terhadap masyarakat, meskipun ada namun tidak sebanding dengan nilai sumber daya yang diambil dan dijadikan keuntungan perusahaan.

Persoalan kemiskinan dan kondisi infrastruktur di desa – desa penghasil dan sekitar tambang Migas diatas memberikan gambaran proter miris wilayah penghasil tambang. Kesenjangan pembangunan antara wilayah tentu harus segera diberikan solusi yang efektif agar tidak akan menimbulkan kecemburuan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), seyognyanya menempatkan desa – desa penghasil dan sekitar tambang sebagai prioritas pembangunan. Hal itu juga sebagai mandate Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Indragiri Hulu dalam Misi ke III adalah **“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Hasil-Hasilnya”**.

## Pembangunan Tanpa Pemerataan

Di Kabupaten Indragiri Hulu, masyarakat mengalami kejenuhan dalam proses perencanaan tahunan. Mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengagendakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) ditingkat Desa/ Kelurahan setiap tahun dilakukan, masyarakat merasa hanya memberikan harapan belaka. Karena banyak usulan masyarakat tidak kunjung terakomodir dalam ABPD tahun bersangkutan. Bahkan sebagian Desa justru tidak melakukan Musrembang tahunan, dengan alasan usulan tahun lalu belum teralisasi. Desa dalam mengajukan usulan Musrembang dikecamatan membawa dokumen usulan yang telah disusun dua hingga tiga tahun yang lalu.

Dominasi proses perencanaan teknokratik menjadi salah penyebabnya. Dimana usulan yang telah disusun dari tingkat bawah justru mentah saat pembahasan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pembahasan bersama DPRD. Tingkat keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan juga minim. Seyognya hasil Musrembang dikumpulkan menjadi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di publikasikan kepada masyarakat untuk diketahui, namun tidak dilakukan sehingga masyarakat dan perangkat desa tidak mengetahui program dan kegiatan apa saja yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan.

### Program Rencana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

| No            | Daerah/ lokasi      | Volume          | Anggaran             |
|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1             | Kec. Kuala cenaku   | (2 titik/paket) | 800,000,000          |
| 2             | kec. Rengat         | (2 titik/paket) | 400,000,000          |
| 3             | kec. Rengat Barat   | (1 titik/paket) | 400,000,000          |
| 4             | kec. Seberida       | (4 titik/paket) | 1,200,000,000        |
| 5             | kec. Batang Gangsal | (1 titik/paket) | 200,000,000          |
| 6             | kec. Batang Cenaku  | (1 titik/paket) | 600,000,000          |
| 7             | kec. Pasir Penyau   | (3 titik/paket) | 500,000,000          |
| 8             | kec. Sei Lala       | (1 titik/paket) | 500,000,000          |
| 9             | kec. Kelayang       | (1 titik/paket) | 400,000,000          |
| 10            | kec. Lirik          | (2 titik/paket) | 1,000,000,000        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>18 paket</b> | <b>6,000,000,000</b> |

Sumber : Dokumen RKPD Indragiri Hulu tahun 2014-2015.

Ketidak pastikan kuota / pagu indikatif yang diberikan ke wilayah (Kecamatan dan Desa) juga menjadi penyebab tidak efektifnya perencanaan pembangunan melalui Musrembang di tingkat Desa tersebut. hal itu menyebabkan banyaknya ketimpangan pembangunan pembangunan, sebagian wilayah mendapatkan jatah pembangunan sangat besar sebagian lainnya sedikit dan bahkan tidak satu pun ketigiatan dilaksanakan di wilayah tertentu pula. Selain itu, prioritas kegiatan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau yang dekat dengan ibu kota kabupat-

Tabel diatas salah satu contoh perencanaan pembangunan yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2014 dan 2015, untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Protret tersebut menggambarkan kesenjangan dan protret ketidakadilan. Dimana Indragiri Hulu terdiri dari 178 Desa dan 16 Kelurahan tahun 2015 hanya di rencanakan 18 paket kegiatan di 10 kecamatan. Begitu juga tahun 2014 hanya di rencanakan tiga kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan anggaran Rp. 646 juta.

Tingginya pendapatan dari Migas yang diperoleh Kabupaten Indragiri Hulu, namun Perencanaan dan penganggaran belum menjadikan Migas sebagai konsideran utama. Ini disebabkan karena perencanaan pembangunan tidak mempertimbangan potensi pendapatan yang peroleh dari sektor Migas sebagai penopang pembangunan. Sebagai dijelaskan sebelumnya bahwa Hasil Migas menjadi pendapatan idnragiri Hulu mempengaruhi 35,4 persen dari total pendapatan daerahnya. Seharusnya sektor Migas memberikan warna yang menonjol pada perencanaan dan penganggaran daerah kedepan.

## Rekomendasi Kebijakan

- **Pendistribusian DBH Migas Ke Desa Melalui Sekeloa Dana Bagi Hasil Kabupaten Ke Desa**

DBH Migas berkontribusi sebesar 35,4 persen terhadap pendapatan daerah. Sementara Potret ketimpangan pembangunan serta realitas kemiskinan terjadi wilayah penghasil dan sekitar lokasi pertambangan. DBH Migas yang diterima daerah hanya sampai pada tingkat kabupaten, serta tidak ada mekanisme pengelolaan khusus DBH Migas yang diterima daerah. Wilayah / desa penghasil dan sekitar tambang sebagai penerima dampak dari proses industry kurang merasakan manfaat. Selain itu, masalah kinerja rendah penyerapan keuangan dibuktikan dengan SILPA yang sangat tinggi pada tahun berjalan, menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu untuk melaksanakan program dan keuangan dengan waktu yang singkat dan terbatas. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan pembagian DBH Migas kepada pemerintah desa khususnya penghasil dan sekitar tambang, agar desa turut mengelola dana yang bersumber dari DBH Migas yang diterima daerah.

### Penggunaan

Penggunaan DBH Migas ke desa penghasil dan sekitar wilayah operasi tambang digunakan untuk **anggaran penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa**. Saat ini peran desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat minim bahkan tidak ada, upaya penanggulangan kemiskinan saat ini sebagian besar dilaksanakan SKPD yang sering kali ditemukan tidak sinkron antara program dengan kebutuhan. Untuk itu, peran desa sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desanya. Peruntukan DBH Migas bagi ddesa digunakan untuk :

- Kegiatan Fisik (yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan berupa peralatan usaha kecil menengah, infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat).
- Kegiatan Non fisik (berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan/hibah modal usaha).

- **Penerapan Sistem Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Pada Proses Perencanaan Pembangunan.**

Pemerataan pembangunan merupakan misi pemerintah daerah Indragiri Hulu sebagai mana tertuang dalam RPJMD 2010-2015. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah masih terjadi. Penumpukan kue pembangunan dalam APBD di satu wilayah yang tidak termasuk prioritas pembangunan, mengakibatkan sebagian justru mendapat alokasi pembangan yang sangat kecil bahkan tidak ada. Mekanisme Murembang hingga di tingkat desa dilakukan, namun harapan warga melalui usulan kerap kali tidak terakomodir. Pendekatan politik dan teknokratis dalam merencanakan pembangunan mendominasi dan merusak perencanaan yang telah disusun melalui mekanisme Musrembang. Untuk itu diperlukan batas minimal alokasi anggaran untuk wilayah kecamatan dalam bentuk Pagu Indikatif Wilayah (PIK).

Penyusunan pagu indikatif kewilayahan dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrebang kecamatan yang berisi program prioritas dan indikasi patokan maksimal anggaran. Sedangkan tujuan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yaitu :

- Menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses musrebang ke dalam APBD Kabupaten;
- Mengurangi kesenjangan antar wilayah
- Penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan

### FITRA RIAU

Jalan : Kartama/Inpers Gg. Bambu Nomor 5 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru web: [www.fitrariau.org](http://www.fitrariau.org) sekretariat.fitrariau@gmail.com

### Ditulis Oleh :

Triono Hadi  
Romagia  
Program RCC Wilayah Indragiri Hulu

